

ISLAM DI FILIPINA

A. Syahraeni, M.Ag^N

Abstract

Moro Nation in Philippine has shown perseverance to stay exist as a Moslem nation. This struggle has shown to the world when the various interests who try to marginalize them. The problem is the unity within the Moro nation itself is not so strong that from this point, the parties who are not happy about his struggle exploit this weakness. Characteristics of top leadership in Philippines which has several times occurred turnover also showed varied solutions in addressing problems in the southern Philippines that the existence of the Moro nation also provide pluctuative atmosphere in its development. Issues that drive Moro Nation in to a corner from the outside world also provides a negative stigma after the existence of violence committed by cadres as alumni of the Southern Philippines fighters, but they should be more careful to peel the real root of the problem. Wallahu A'lam.

Kata Kunci : Islam, Filipina, Moro

I. Pendahuluan

Islam masuk ke kepulauan, yang sekarang bernama Filipina, tercatat sekitar abad keempat belas. Mereka berintegrasi dengan penduduk asli dan berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang meliputi hampir seluruh Filipina sekarang. Tetapi di Selatan, mereka lebih kuat daripada utara (Luzon dan Visayas). Begitu Spanyol datang di bawah Charles I dan Ferdinan Mangelan, yang kemudian dilanjutkan dengan pimpinan Philip II dan Legaspi, daerah utara berhasil dikuasai oleh Spanyol. Ini terjadi pada abad keenambelas. Jadi nama Filipina diambil dari nama penjajah Spanyol.

Daerah Selatan, karena secara politik sosial, ekonomi dan relegius lebih solid, masih tetap bertahan, sehingga arus penaklukan dan kristenisasi bisa dihadang. Spanyol terus berusaha untuk menaklukkan kesultanan dengan menggunakan orang-orang yang sudah dikristenkan untuk memerangi orang-orang Islam di selatan. Karena mereka menunjukkan perlawanan yang hebat, Spanyol menamakan mereka sebagai perampok yang kejam dengan cap "Moro".¹ Sampai sekarang gambaran mengenai Moro yang diambil dari persamaan pengalaman Spanyol di Afrika Utara, masih

^NDosen Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Alauddin Makassar

mengandung konotasi negatif di kalangan kristen Filipina pada umumnya; kasar, keras perampok kejam dan sebangsanya.

Islam telah mempunyai sejarah yang panjang di Filipina sejak zaman pra kolonial, masyarakat muslim di bagian selatan tercatat sebagai masyarakat yang mampu mempertahankan diri dari penetrasi Spanyol selama 300 tahun.²

Perlawanan cukup lama, ratusan tahun, menyebabkan sumberdaya mereka terkuras habis. Dengan datangnya Amerika di akhir abad kesembilan belas. Spanyol di kalahkan Amerika dengan taktik memecah belah dan menguasai, akhirnya berhasil mengintegrasikan Mindanao sebagai satu kesatuan dengan kendali pemerintahan jajahan, yang sebelumnya tidak bisa dilalukan oleh Spanyol.

Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat setelah penandatanganan perjanjian Paris pada tahun 1898. Suprioritas militer Amerika memaksa para Datuk yang gigih untuk tunduk kepada kekuasaan Amerika Serikat. AS membiarkan Islam dan hukum adat Moro tak tersentuh, asal tidak bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat.

Kedaulatan Filipina dipulihkan pada 4 Juli 1946 dengan mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi Amerika. Sejak itulah wilayah kaum muslim di selatan mulai disatukan secara administratif dan sistematis. Dalam masyarakat politik lebih luas, meskipun untuk itu menimbulkan banyak hambatan.³ Percepatan program integrasi dan pembangunan nasional yang mengakibatkan masuknya warga kristen ke daerah Moro (Mindanao, Sulu dan Palawan).

Kebijakan menempatkan orang-orang keristen di Mindanao mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok pembebasan seperti Muslim Independen Movement (MIM) tahun 1960an. Selanjutnya muncul gerakan Moro Nasional Liberation Front (MNLF) dan Bangsa Moro Army (BMA) 1969 yang berjuang bagi kaum Muslim Filipina. Selanjutnya muncul Moro Islamic Liberation Front (MILF) 1982 dan Abu Sayaf Group (ASG) tahun 1990.

Dalam kondisi yang terus menerus berada dalam suasana perang. Secara ekonomis muslim Mindanao jauh ketinggalan dari penduduk kristen di utara. Dari keterpurukan bangsa Moro ini, mungkin ada skenario dari barat sebagai suatu kesengajaan dalam melunakkan perjuangannya kalau tidak mau dikatakan melenyapkannya.

II. Sejarah Masuk dan Perkembang Islam di Filipina

Filipina adalah suatu Republik di Asia tenggara, termasuk rumpun melayu anggota Asean, luas wilayahnya 299400 km², Ibu kota Manila, bentuk negara Republik dan menggunakan bahasa Tagaloh dan inggeris. Agama Katolik di utara dan Islam di selatan. Dari tahun 800-1377 M Filipina termasuk dalam pengaruh Sriwijaya selanjutnya dibawah pengaruh Majapahit. Pada Abad 13 Islam masuk ke Filipina dan berhasil mendirikan kesultanan di Sulu dan Mindanao.

Masuknya Islam di sana mulai dari selatan yaitu Sulawesi dan Sumatra. Sumber-sumber Islam memberikan informasi bahwa masuknya Islam di Filipina sekitar tahun 1365 M.

Dalam kenyataan, bangsa Moro adalah bangsa yang penuh kebanggaan dengan sejarah gemilang. Ketika suku-suku di Filipina masih hidup dalam kelompok kecil, orang Moro sudah sanggup membangun kerajaan. Langkah pertama dimulai dengan datangnya orang Islam di Mindanao pada awal abad ke 14. Di Pulau Sulu penyebar Islam pertama bernama Masha'ika tahun 1365, kedua Syarif Makhdin tahun 1381, ketiga Raja Bagindo seorang bangsawan Minangkabau datang bersama pengikutnya tahun 1390 dan beliau diangkat sebagai raja setempat. Syarif Abu Bakar datang pada tahun 1434 dan seorang arab dari Palembang dan diangkat sebagai raja dan mulailah kesultanan Sulu dan beliaulah yang pertama mendirikan pemerintahan Islam di sana. Di bawah pemerintahan syarif Abu Bakar (1434-1465 M) hampir seluruh Filipina dikuasai Islam. Syarif Muhammad bin Ali datang dari Johor tahun 1486 M dan dinobatkan menjadi raja di Mindanao dengan gelar Sultan Mangendanao. Melalui jalur dagang Islam menyebar di utara. Pada tahun 1521 sebuah pemukiman Islam berdiri di Manila dan sebuah lagi di Tondo.

Dari sini dapat dilihat bahwa telah terjadi asimilasi. Berbagai suku dan bangsa datang ke Filipina waktu itu. Seperti adanya bangsa Arab datang, bangsa Melayu, sehingga dapat dipastikan bahwa terjadi pembauran budaya yang diikat dengan satu kepercayaan yaitu Islam.

Masyarakat Moro di Filipina Selatan merupakan minoritas dan terkontsetrasi. Mereka telah mengalami proses proses peminoritasan dengan semakin gencarnya perluasan militer, politik dan ekonomi secara berturut-turut oleh penguasa Spanyol, Amerika, dan Republik Filipina. Pada Tahun 1948 Jumlah masyarakat Moro di Filipina selatan telah menjadi kurang dari separoh (38 %) dan pada tahun 1970 telah menjadi 21 %. Faktor utama penurunan jumlah ini adalah karena migrasi terencana dan besar-besaran dari bagian utara Filipina ke tanah Moro akibatnya hanya masyarakat Moro menjadi semakin terjepit dan terisolasi. Tahun 1987 menjadi 9,4 % dari 40,7 juta penduduk yakni sekitar 5 juta orang. Kemudian pada tahun 1990 menjadi 8,5 % dari total penduduk 66 juta yaitu berkisar 5-6 juta jiwa. Mereka tidak siap menghadapi persaingan di hampir semua bidang, apalagi lahan perekonomian tradisional mereka pun terpaksa ikut diperebutkan.

Upaya pemerintah Amerika Serikat yang kemudian dilanjutkan pemerintah Republik Pilipina untuk mengintegrasikan masyarakat Moro melalui elite muslim ternyata tidak berhasil. Kecendrungan untuk menganak-emaskan kelompok kecil ini tidak membuka saluran bagi masyarakat muslim secara keseluruhan. Akibatnya elit tersebut justru kehilangan kepercayaan dikalangan masyarakat Moro yang memicu terjadinya konflik internal dikalangan masyarakat Moro.

Meskipun terdapat perpecahan dikalangan Moro, Islam Filipina muncul sebagai simbol perlawanan minoritas terhadap mayoritas kristen. Namun, krisis Mindanao bukan semata-mata persoalan yang muncul di antara kedua agama tersebut. Namun ada sejumlah isu yaitu ekonomi, politik, sosial, psikologis dan militer. Secara Politis sebagai bangsa Filipina orang Moro telah tersingkir dari konstitusi Filipina.

Integrasi nasional semakin memburuk oleh karena identitas Moro sebagai Muslim Filipina yang harus memiliki otonomi penuh atau merdeka.⁴

Bansom mengidentifikasi komplik tersebut sebagai persoalan psikologis karena kedua kelompok agama memperlihatkan sikap intoleransi, kesalah-pahaman, miskomunikasi dan tidak menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kesenjangan psikologis yang tidak dapat diperbaiki ini akhirnya menghasilkan kegagalan baru. Dalam kaitannya dengan sekularisme Filipina citra negara katolik masih tertanam di antara negara-negara Asia lainnya. Karena 80 % penduduk Filipina beragama Katolik. Konsekwensinya, persoalan itu dianggap sebagai kegagalan orang-orang kristen dalam menangani orang-orang Muslim.⁵

Tahun 2001 Jumlah penduduk Muslim mencapai sekitar 15 % dari seluruh penduduk negara (82.841.518 jiwa) dan sekitar 23 % dari penduduk Filipina selatan.

III. Kebijakan Pemerintah.

Ketika kekuatan kolonial Spanyol tiba di Filipina, Muslim Mindanao, Kepulauan Sulu, Tawi-Tawi Pulau Basilan dan Palwan, sudah memiliki negara dan pemerintahannya sendiri dengan hubungan diplomasi dan perdagangan dengan negara-negara lain termasuk Cina. Sistem administrasi dan politik didasarkan pada hubungan yang ada di negara-negara tersebut. Bahkan saat itu bangsa Moro sudah memiliki sistem administrasi dan pertahanan yang mampu mendukung perlawanan militer terhadap kekuatan kolonial barat selama beberapa abad dan mampu memelihara intensitas mereka sebagai entitas organisasi dan politik.

Selama berabad-abad bangsa Spanyol berusaha menaklukkan negara Moro untuk menghilangkan eksistensi mereka dan menambah teritori penjajahan spanyol di kepulauan Filipina. Namun sejarah membuktikan hal ini tidak pernah berhasil. Negara bangsa Moro dengan kekuatan maritim dengan prajurit terorganisir baik, sukses mempertahankan wilayah bangsa Moro dan mempertahankan kemerdekaan mereka. Fakta inilah yang menjadi dasar logika bahwa wilayah bangsa Moro bukan termasuk wilayah yang diserahkan Spanyol ke AS dalam perjanjian Paris 1898, karena Spanyol tidak pernah berkuasa di wilayah tersebut.⁶

Perjuangan bangsa Moro mempertahankan kemerdekaannya terus berlanjut, bahkan ketika kekuatan AS menduduki beberapa wilayah di Mindanao dan Sulu pada saat itu, perlawanan bangsa Moro tidak sehebat dengan perlawanan mereka pada saat perang Moro-Spanyol. Tapi lewat perjuangan gerilya yang terorganisir dengan rapi mereka melancarkan serangan terhadap kekuatan AS dan instalasinya. Menunjukkan bahwa kekuatan militer kesultanan masih ada. Bahkan individu bangsa Moro menunjukkan ketidak patuhan terhadap pendudukan AS dengan menyerang kekuatan AS dalam usaha yang disebut perang sabil.

Ketika pemerintah AS berjanji untuk memberikan kemerdekaan pada kepulauan Filipina, para pemimpin Moro menyatakan keberatan menjadi bagian dari republik Filipina. Dalam petisi yang ditujukan kepada presiden AS tanggal 9 Juni 1921 rakyat Sulu menyatakan bahwa mereka lebih baik menjadi bagian dari AS ketimbang menjadi bagian dari Filipina merdeka.⁷ Mereka menginginkan tetap

berbeda dari Filipina kristen, bertahan di bawah perlindungan Amerika sampai mereka dapat mendirikan negara sendiri yang terpisah.

Ketika Republik Filipina didirikan pada tahun 1946, orang-orang Moro dimasukkan dalam struktur pemerintahan tanpa konsultasi dan izin mereka yang menyebabkan situasi tidak kondusif karena kebanyakan orang Moro tidak mengidentifikasi diri dengan bangsa Filipina. Komplik diperburuk oleh berbagai faktor, membanjirnya pemukiman kristen ke wilayah Muslim secara tak terkendali, penelantaran nasional yang terus menerus terhadap aspirasi ekonomi dan pendidikan bangsa Moro diskriminasi yang nyata-nyata dalam meyalani kaum muslim di kantor-kantor di tingkat Nasional, hilangnya kekuasaan politik para pemimpin Moro di daerah kekuasaan mereka semula. Komplik tajam mengenai tanah antara penduduk Moro dan Kristen. Kekuatan-kekuatan ini secara progresif menyebabkan meningkatnya pertikaian bersenjata antara kelompok kristen dan Moro. Kepolisian dan tentara memihak yang pertama. Moro meneriakkan adanya pembersihan etnis untuk menarik simpati dunia Islam.⁸

Ketika Presiden Ferdinan Marcos memaksakan UU darurat 1972, komplik antara umat Islam dan Kristen meningkat, sehingga menyulut pemberontakan secara terbuka. Gerakan pembebasan yang paling mendapat dukungan luas ialah Moro National Liberation Front (MNLF)- From Pembebasan Nasional Moro. Dengan kelompok militer mereka, tentara bangsa Moro (BMA) dibawah pimpinan Nur Misuari.

MNLF berhasil menggalang dukungan dari para pemimpin Islam, seperti presiden Muarmar al-Kadzafi dari Libia dan Tun Mustafa Harun, menteri kepala Sabah Malaysia dan memaksa pemerintah Filipina untuk menandatangani perjanjian Tripoli 1976. Yang memberi otonomi penuh bagi daerah Moro. Berdasarkan perjanjian tersebut, masyarakat Moro akan mendapatkan hak otonomi penuh atas 13 propinsi di Filipina Selatan yakni Basilan, Sulu, Tawi-tawi, Samboanga del Sure, Samboangan del Norte, North kotabato, Manguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao Del Sure, South Cotabato dan Palawan.⁹ Marcos terus membuat manuver untuk mendekati kepulauan Muslim yang dapat diajak kerjasama.

Pada tahun 1973 bahasa Arab yang dipakai sebagai medium pengajaran di sekolah-sekolah yang diikuti kaum muslim dan dua hari raya Islam diakui sebagai hari libur resmi bagi umat Islam. Lembaga keuangan (Bank) Islam dalam bentuk lembaga zakat, wakaf dan sistem bank Islam, lembaga tersebut mengelola perseroan terbatas, asuransi, lembaga management berdasarkan prinsip teori keuangan Islam. 1977 UU hukum perdata Muslim Nasional disahkan meskipun tidak semua kantor peradilan dan wilayah syariat memberlakukan UU tersebut. Pada tahun berikutnya otoritas perjalanan haji Filipina dibentuk untuk mengatur dan memfasilitasi haji tahunan. Setiap Tahun ratusan orang menunaikan ibadah haji, mesjid dan madrasah baru didirikan, pemerintah berusaha meningkatkan sistem madrasah sambil mengintegrasikan beberapa madrasah kedalam sistem pendidikan Nasional. Ada juga peningkatan bea siswa pemerintah untuk para pelajar Moro, umat Islam yang

memenuhi syarat banyak di terima pada posisi puncak departemen kehakiman dan departemen urusan luar negeri.¹⁰

Puncak kebijakan ini adalah pembentukan kementerian urusan Islam dengan wadah formal ini diharapkan masyarakat Moro menjadi lebih yakin dengan program yang ditawarkan pemerintah kepada mereka. Namun sebahagian warga Muslim meragukan ketulusan Marcos dalam menyelesaikan persoalan Moro dan beranggapan bahwa program pembangunan di Filipina selatan hanyalah kedok ke arah integrasi yang merugikan. Kaum Moro menginginkan perubahan yang tetap menampung aspirasi umat Islam.

Pergantian pimpinan Filipina 1986 juga membawa angin segar bagi bangsa Moro. Tak lama setelah resmi berkuasa Presiden Corason Aquino mengadakan pertemuan dengan para pemimpin MNLF, walupun Cori gagal menciptakan perjanjian dengan MNLF, namun Cori telah memasukkan rencana otonomi untuk masyarakat Moro ke dalam konstitusi baru Filipina.¹¹

Pasal X bab 15-21 dari konstitusi Filipina memuat aturan-aturan mengenai wilayah otonomi. Selanjutnya ARMM dilaksanakan, proses referendum dilaksanakan pada bulan November 1989 yang memilih Nur Misuari sebagai Gubernur ARMM.¹²

Pengganti Aquino Jenderal Fidel Ramos kelihatan lebih yakin untuk mencapai penyelesaian akhir bagi masyarakat Moro. Pada tahun 1992, Ramos mengusulkan pembentukan wilayah otonomi di selatan seperti yang disetujui dalam perjanjian Tripoli. Untuk tujuan ini dibentuk Souterm Philipines Council for place and development (SPCPD) atau dewan perdamaian dan pembangunan Filipina Selatan dan Nur Misuari sebagai ketua Dewan itu.

Pada tanggal 2 September 1997 dilakukan penandatanganan perjanjian perdamaian. Perjanjian tersebut dicapai setelah dilakukan serangkaian perundingan di Jakarta yang dimulai pada bulan oktober 1993. Indonesia memainkan peran penting dalam perundingan itu sebagai fasilitator.¹³

Walaupun tidak semua gerakan Moro mengikuti langkah Nur Misuari, kelihatannya usaha perdamaian dan pembangunan yang dilancarkan mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat Moro.

Selanjutnya ketiga belas propinsi di Filipina Selatan dibentuk menjadi zone of pace and deelopment (zopad) atau zona perdamaian dan pembangunan dengan empat propinsi yang mayoritas Muslim tetap menikmati otonomi (Danao Selatan, Maguindanao, Sulu dan Tawi-tawi). Keempat propinsi tersebut disatukan dengan nama daerah otonomi Islam Mindanao dan Nur Misuari diangkat sebagai Gubernur pertama wiyayah otonomi Muslim tersebut disamping sebagai ketua SPCPD.¹⁴

Fidel Ramos memberlakukan kebijakan yng tidak terlalu militeristik terhadap MNLF. Kesepakatan damai antara pemerintah dan MNLF pada tahun 1998 merupakan klimaks dari seluruh proses perundingan damai. Ramos disambut sebagai satu-satunya pemimpin yang secara serius berupaya menyelenggarakan perundingan damai.

Kesepakatan damai yang dicapai tidak berlangsung lama hanya sampai tahun 1999. Setelah Estrada menjadi Presiden, militer kembali ke panggung kekuasaan dan Estrada mengumumkan perang total terhadap Moro. Konflik internal terhadap faksi MNLF terutama antara Misuari dan Husin merupakan salah satu permainan perang tersendiri dalam politik Filipina. Intrik politik dirancang sampai mendekati kesepakatan damai, Nur Misuari dituduh melakukan korupsi oleh para pendukungnya yang kemudian beralih kepada kubu MNLF pimpinan Hashim Salamat. Misuari juga disalahkan, karena tidak memberikan komitmen sepenuhnya kepada ARMM. Sebaliknya Misuari menuduh pemerintah Filipina di Manila tidak merealisasikan dana pembangunan untuk rakyat Mindanao sehingga menyebabkan 2.000.000 penduduk muslim di kawasan itu menjadi warga paling miskin di Filipina. Referendum terakhir yang diadakan pada tanggal 26 November 2001, telah mengangkat DR. Farouk Husin sebagai gubernur ARMM, menggantikan Nur Misuari. ARMM sekarang berada di bawah kepemimpinan Farouk Husin yang diharapkan oleh banyak pihak menempuh langkah yang berbeda dari Misuari.

Aroyo mengambil posisi berbeda dengan cara mendominasi perundingan damai dengan para pemberontak, terutama karena ia pernah terlibat dalam proses perdamaian sebelum menjadi presiden. Ia menggunakan simbol-simbol perdamaian bagi gerakannya yang digambarkan sebagai jauh dari aksi kekerasan. Tetapi pertemuan damai dengan Aroyo sangat diskriminatif, ia tidak bersedia mengadakan dialog dengan kelompok Sayyaf (ASG) tetapi bersedia bicara dengan MNLF. Presiden Aroyo menyetujui gencatan senjata di Mindanao dan kembali kepada dialog perdamaian yang melibatkan seluruh elemen-elemen pemerintah pusat dan daerah, pemimpin-pemimpin agama Islam dan Kristen, MNLF, MILF dan NPA.

IV. Kelompok-Kelompok Perjuangan Moro.

1. Moro Nasional Liberation Front (MNLF)

Untuk melindungi kepentingan dan identitas budaya Moro (Muslim Filipina) Front Pembebasan Rakyat Moro (MNLF) dibentuk pada tahun 1969 oleh sekelompok pemuda Moro progresif. Kelompok ini dipimpin oleh Nur Misuari, seorang mantan aktivis mahasiswa Universitas Filipina. Pembentukan MNLF merupakan tanggapan terhadap manifestasi historis dendam religius dan politik antara mayoritas Kristen dan minoritas Muslim di Filipina. Selain itu, percepatan program integrasi dan pembangunan Nasional selama tahun 1950-an dan 1960-an yang mengakibatkan masuknya warga Kristen ke daerah Moro (Mindanao, Sulu dan Palawan). Orang-orang Moro mencurigai motif pemerintah di balik integrasi tersebut dan khawatir kalau-kalau hal itu dimaksudkan untuk menghancurkan komunitas Muslim (Ummah).

Ketika Presiden Ferdinand Marcos memaksakan undang-undang keadaan perang di Filipina pada tahun 1972, konflik antara umat Kristen dan umat Islam meningkat. MNLF berhasil menggali dukungan dari para pemimpin Islam, seperti Presiden Muammar Kadhafi dari Libia dan Tun Mustapha Harun, Menteri kepala Sabah, Malaysia. Pada tahun 1974, Komite Pusat MNLF mengeluarkan sebuah manifesto yang

mendeklarasikan niatnya untuk mendirikan Republik Bansa Moro yang merdeka. Dengan dukungan Libia dan negara-negara anggota Organisasi Komprensi Islam (OKI), MNLF berhasil meningkatkan peperangan selama 1073-1976 yang memaksa pemerintah Filipina untuk menandatangani perjanjian Tripoli yang memberi otonomi penuh bagi daerah Moro.

Akan tetapi, peningkatan kekuasaan MNLF yang begitu cepat bukan merupakan hasil dari pengorganisasian yang efektif, melainkan lebih diakibatkan oleh kombinasi kebetulan dari keadaan-keadaan yang ada. Termasuk dalam hal ini adanya berbagai kelompok bersenjata Moro yang berjuang melawan pemerintah, serta dukungan dari beberapa negara Muslim menanggapi penderitaan bangsa Moro.

2. Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Moro National Liberation Front (MNLF) Pimpinan Nur Misuari adalah kelompok dominan dalam mewakili kepentingan Bangsa Moro. Namun terjadi perpecahan antara Nur Misuari dengan wakilnya. pada tanggal 26 Desember 1977. Pada pertengahan tahun 1976, Hasim Salamat sudah mempermasalahkan superioritas Misuari dan etnik *Tasauq* dalam komite pusat. Ia juga menggugat, kurangnya etnis maramais dan Mangindanai dalam komite keuangan MNLF. Ia tidak diberi tahu tentang kondisi keuangan organisasi. Kecendrungan Misuari kepada Abd. Baki juga dipermasalahkan. Ia adalah ketua komite hubungan luar negeri, namun Misuari tidak selalu menyertakannya dalam pertemuan-pertemuan internasional sedangkan Abd. Baki sebagai sekjen. Salamat selalu mendapat peran sebagai juru bicar MNLF di negeri-negeri Arab. Akibat kasus tadi menyebabkan Salamat berencana mengambil alih kepemimpinan dalam MNLF.¹⁵

Salamat mencari dukungan dari pemimpin agama, khususnya dari Cotabato dan Lanao untuk mereformasi hirarki dan sistem finansial dalam gerakan revolusi. Ia mengusulkan untuk membuat komite pusat yang anggotanya merepresentasikan kelompok-kelompok etnis bangsa Moro dan urusan revolusi akan ditangani oleh kepemimpinan bersama dan berjanji akan menciptakan komite finansial dimana setiap etnis Moro akan terwakilkan.

Menjelang akhir tahun 1977, para mahasiswa Moro di Mesir sangat aktif mendukung Salamat. Di Saudi Arabia pemimpin tradisional Moro termasuk Salipada Padatuan dan senator Rashid Lukman mendukung pemisahan dan Salamat diharapkan dapat memegang kontrol atas gerakan revolusi. Pengikut Salamat dari kelompok pemuka agama sangat besar di Lanao dan Cotabato. Mantan Senator Ahmad Domacao Aonto adalah pendukung utama Salamat. Pemuka agama Aleem Abd. Aziz, Aleen Umar Pasigau, tetua ulama Cotabato, Zacaira Candao, mantan gubernur region Muslim Mindanao dan Pangalian Balindang dari Lanao, juru bicara Dewan Legislatif regional menjadi pendukung Salamat.¹⁶

Pada awal pertengahan tahun 1977, terjadi perpecahan antara MNLF dan pemimpin lapangannya dan membuat garis demarkasi yang jelas. Satu hal yang dibutuhkan untuk melengkapi perpecahan dan menenggelamkan MNLF, demarkasi resmi Hasim Salamat dan mengumumkan dirinya sebagai pemimpin kelompok baru

yang berpisah dari faksi MNLF pimpinan Misuari. Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 26 Desember 1977 dan menandai lahirnya MILF (Moro Islamic Liberation From) atau From Pembebasan Islam Moro. Namun pemunculan kelompok ini secara resmi dilakukan pada tahun 1982. Kelompok ini dianggap kelompok “garis keras”.

3. Abu Sayyaf Group (ASG).

Lahirnya Abu Sayyaf, menurut Prof. Zulkifli Wadi dari Universitas Filipina, adalah satu kelompok fundamentalis yang paling aktif di Filipina saat ini. Kelompok Abu Sayyaf dibentuk pada awal tahun 1990 an, di bawah kepemimpinan Abd Razak Janjalani. adalah sekelompok ulama yang pernah dilatih di Timur Tengah. Umumnya usaha revolusioner Abu Sayyaf tersebar secara geografis di area Suli Basilan, Zamboaga City dan daratan utama Mindanao. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat keimanan Islam di Filipina Selatan, mengeliminir tekanan dan mendirikan pemerintahan yang melaksanakan syariah, Strateginya melalui jaringan dakwah dan pelatihan militer dan menciptakan kekuatan masyarakat kota bergerak untuk membujuk, politisasi dan perang gerilya.¹⁷

Sebelum Abu Sayyaf memunculkan diri di awal 1990 an, Janjalani mengumumkan fatwa bahwa Jihad adalah fardu ain. Pada tahun 1991 Abu Sayyaf menjadi perhatian publik karena serangannya pada kelompok misionaris kristen protestan di M/V Daulos gang. Dua orang meninggal dan melukai 38 orang lainnya. Serangan ini dilakukakan sebagai reaksi atas pernyataan salah satu pengikut Evangelist tersebut di kampus negara Mindanao barat mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. Adalah seorang pembohong. Kejadian berdarah ini diikuti seangkaian pemboman di beberapa tempat umat beragama dan tempat publik, penculikan warga negara asing dan lokal, pendeta dan usahaan dan pertempuran sporadis dengan militer. Serangan kelompok ini merupakan respon terhadap tuduhan adanya pembunuhan massal oleh militer di Samboanga City. Serangan selanjutnya terjadi di Ipil Samboanga del Sur pada tanggal 4 April 1995.¹⁸ Saat ini mereka lebih identik dengan aktifitas penculikan untuk meminta tebusan. Kelompok ini terlibat dalam penculikan dan aktifitas lain yang justru berlawanan dengan ajaran Islam dan kekerasan yang mereka lakukan justru akan mengucilkan mereka dari mayoritas muslim. Mereka menyimpang dari ajaran ideal yang awalnya ditujukan Abu Sayyaf demi mendapatkan keuntungan materi lewat perbuatan-perbuatan kriminal tersebut.

Identitas riil dan jaringan Abu Sayyaf dan MILF sangat bervariasi, misi perdamaian International yang telah melakukan penelitian mengenai situasi di Basilan pada 23-27 Maret 2002 mengemukakan bahwa tergantung kepada siapa anda bertanya. Abu Sayyaf bisa menjadi sekumpulan bandit serakah atau gerakan separatis ekstrimis yan berjuang untuk pendirian negara Islam atau sel jaringan teroris al-qaidah. Saat ini, sejak kelompok itu menjadi buronan militer Filipina, orang hanya bisa menduga duga jaringan ril mereka di dalam dan luar negeri, termasuk jamaah Islamiyah. Bagaimanapun juga dengan adanya perang total melawan terorisme dilakukan di seluruh dunia, kemungkinan semua tersangka teroris dan radikal untuk bersatu tak bisa diingkari bahkan aliansi antar mereka ASG, MILF, MNLF, Jama'ah

Islamiyah bisa menjadi kenyataan jika Amerika Serikat dan sekutunya benar-benar melancarkan perang anti terorisme secara internasional.

Situasi saat ini telah berubah menjadi sikap “menunggu dan melihat” dari semua pihak yang terlibat komplik, namun dengan situasi yang sedang menunggu seperti ini, keadaan akan lebih memburuk, baik di AS maupun di Asia Tenggara. Harus disadari bahwa saat ini, citra Abu Sayyat dan MILF dimata International telah memburuk. Transformasi ini terjadi bukan hanya keterlibatan mereka dalam aktifitas jaringan terorisme, tetapi juga ketiadaan pemimpin kharismatik yang bisa menampilkan citra baik bagi kedua kelompok selama masa-masa kelahiran mereka. Dengan kekosongan kepemimpinan, Mustahil bagi MILF dan Abu Sayyat untuk kembali berjaya.

c. Hubungan MILF dengan Jamaah Islamiyah.

Para petugas polisi dan intelegen AS mengatakan, mereka bersiap-siap menghadapi ancaman global yang dilakukan oleh kaum militan Islam Asia Tenggara, yaitu Seorang ulama Indonesia berjenggot bernama Irwan Izamuddin yang lebih dikenal dengan sebutan Hambali, berusia 36 tahun. Ia merupakan veteran perang Afganistan melawan Uni sovyet, sekitar tahun 1980. Hambali merupakan tokoh utama jaringan Al-Kaedah di Asia Tenggara yang menecanakan serangan teroris paling ambisius terhadap AS dan sekutunya. Hal ini dinyatakan para agen keamanan Singapura dan Negara Asia lainnya, seperti Filipina dan Malaysia.

Para Polisi Singapura, Malaysia dan Filipina menyatakan mempunyai bukti-bukti yang mengarah kepada Hambali sebagai pelaku utama yang merencanakan berbagai aksi serangan teroris seperti pemboman kedubes AS dan kantor-kantor perdangan dan instalasi militer AS di singapura dan ditemukan sebuah rekaman pos penjagaan di markas al-kaedah di Afganistan dan agen intelegen Asia menyatakan Hambali dan al-Qaedah juga sedang mengejar rencana jangka panjang yang jauh lebih ambisius, yaitu mendirikan negara Islam yang mencakup Indonesia, Malaysia dan kepulauan Muslim di Filipina. Diduga keras Hambali dan kelompoknya merencanakan pembunuhan dan pemboman di tiga negara itu dan juga mendukung aksi jihad atau perang suci melawan umat keristen.

Kegiatan Hambali selama 8 tahun terakhir, memberikan gambaran mengenai karakteristik teroris di Asia Tenggara yang berpusat di ketiga negara itu. Sebelumnya para agen intelegen Barat memandang kaum militan Islam Asia sebagai kaum pinggiran yang semata-mata dipandang sebagai isu domestik namun kegiatan Hambali di empat negara asia, sepertinya menunjukkan Asia Tenggara sebagai tempat peneluran kaum militan go international. Bahkan sejak operasi 1993, jaringan al-Qaidah di Asia Tenggara tidak pernah benar-benar hancur dan itu telah mendorong ekspansi yang cepat dalam ekstrimisme Islam di kawasan ini.

Penangkapan terhadap Hambali jadi prioritas utama para agen keamanan di asia tenggara, karena pemerintahan Bush telah memperluas perang global terhadap al-Qaedah di kawasan ini. Lebih dari 600 pasukan AS tiba di Filipina Selatan untuk membantu Manila mengalahkan Abu Sayyat-kelompok pemberontak Muslim yang

terkait dengan Osamah Bin Laden dan al-Qaeda. Beberapa pejabat AS menyatakan, Washinton akan memperluas peranannya membantu pasukan Filipina memerangi kelompok militan lainnya atau menghadapi ekstrimis yang beroperasi di Indonesia.

Agen keamanan Malaysia dan Filipina menyangka Hambali dan kelompoknya aktif di kedua negara itu, pada pertengahan 2000. Presiden Filipina Yoseph Estrada menyerang MILF. Pembicaraan damai pun di tempuh tapi Estrada akhirnya memerintahkan untuk menyerang kamp MILF yang diyakini pejabat intelijen Malaysia dan Filipina sebagai pusat pelatihan kaum militan Asia Tenggara.

Hambali segera membantu aksi balas dendam MILF. Pada tanggal 1 Agustus 2000, Bom Meledak di Luar rumah Kedubes Filipina di Jakarta, yang menewaskan 2 orang dan melukai beberapa orang diplomat. Kemudian 30 Desember 2000 Bom meledak dalam kereta Api penumpang di Manila menewaskan 22 warga Filipina. Sebenarnya pihak kepolisian Indonesia dan Filipina tidak yakin siapa yang merencanakan kedua serangan itu, tapi penyadapan telepon dan interogasi menangkap adanya operasi al-Qaeda di Filipina.

Laporan terus mengalir mengenai kaitan MILF dan JI membawa suasana mendung yang merupakan ancaman bagi proses perdamaian antara MILF dan Pemerintah Filipina. Kendati Pimpinan MILF tetap menampik segala kaitan tersebut, Seluruh bukti menunjuk adanya hubungan operasional dan pelatihan yang masih berjalan. Paradoks sentris pada proses perdamaian di Filipina selatan adalah bahwa proses tersebut merupakan jangka pendek utama mendongkel jaringan teroris sekaligus unsur yang senantiasa perlu bagi setiap upaya jangka panjang penanggulangan teror. Upaya bergerak langsung melawan teroris yang tertanam di wilayah yang dikuasai MILF membawa resiko terjadinya peningkatan kekerasan serta macetnya perundingan. Akan tetapi, tanpa kesepakatan perdamaian yang berhasil, daerah tersebut akan tetap ditandai iklim ketidak pastian hukum yang merupakan lahan subur bagi terorisme.

Pencapaian jangka pendek adalah mencegah kemungkinan meletusnya kembali perang. Salah satu langkah yang dapat diambil yaitu segera memberlakukan mekanisme kerjasama antara pemerintah Filipina dan MILF yang telah disepakati kedua belah pihak pada tahun 2002 namun belum pernah dilaksanakan. Untuk bertindak terhadap unsur kriminal yang mencari suaka di wilayah MILF terhadap proses perdamaian melalui cara tersebut dapat diimbangi dengan menunjuk dewan perdamaian tetap di pihak pemerintah Filipina yang dilengkapi sumber daya yang memadai guna membangun kesepakatan di antara stake holder utama, mengenai bentuk otonomi yang lebih sempurna.

JI yang kini mempunyai reputasi buruk akibat kegiatannya, mulai bercokol di daerah Filipina Selatan pada tahun 1994 dengan memperdalam hubungannya dengan kelompok separatis MILF yang dirintis ketika sama-sama berada di Afganistan pada tahun 1980. Hubungan pribadi yang terjalin antara ketua MILF pertama (Hasim Selamat) dengan pimpinan JI seperti Abdullah Sungkar dan

Zulkarnaen memungkinkan berdirinya pelatihan dibawah perlindungan MILF yang meniru sistem kamp di Afganistan dimana organisasi pertama di bentuk.

Selain mengisi jajaran JI di Indonesia yang terkikis akibat penangkapan yang dilakukan pada pasca bom Bali, beberapa lulusan tersebut telah melancarkan serangan teror di Filipina bersama MILF setempat dan kelompok Abu Sayyaf. Menurut informasi yang diperoleh ICG, ada indikasi bahwa arsitek dari serangan yang dilakukan belum lama ini adalah lulusan kamp Mindanao berasal dari Jawa bernama Zulkifli. Zulkifli ditangkap di Malaysia pada akhir tahun 2003, namun sebelumnya ia berhasil mengarahkan aksi bom di Davao pada maret dan April 2003 yang menewaskan 38 orang dan hingga saat ini merupakan hambatan besar bagi perundingan perdamaian.

Hubungan JI – MILF jelas tengah berlanjut, namun dengan cara yang lebih didesentralisasi. Semenjak tentara Filipina melibas kamp-kamp utama MILF pada tahun 2000, pasukan MILF tersebar menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan bersifat otonom dan kadangkala tidak diakui pimpinan MILF yang menyebutnya komando-komando yang hilang. Sebelumnya bentuk MILF memang sudah agak longgar, akan tetapi menyusul gebrakan tahun 2000 serta kematian Hasim Selamat di bulan juli 2003, satuan tersebut menjadi kian mandiri.

Saat ini belum begitu jelas bagaimana pandangan pimpinan baru MILF yang mengitari pengganti Hasim. Yaitu Haji Murad terhadap ikatan dengan JI. Secara resmi, MILF telah menafikan terorisme. Karena itu mengingat apa yang kini terungkap mengenai kaitan JI-MILF, ada tiga kemungkinan menafsirkan sikap resmi tersebut yang seluruhnya menunjukkan dampak buruk bagi proses perdamaian.

V. Penutup

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa ;

1. Perjuangan bangsa Moro untuk mempertahankan dirinya dari penjajahan sejak bangsa Spanyol hadir, AS dan Republik Filipina tidak pernah berhenti sebelum cita-cita yang diharapkan terwujud Merdeka atau otonomi penuh.
2. Setiap penjajah yang datang selalu menerapkan ide-ide untuk meminoritaskan bangsa Moro sebagai umat Islam.
3. Setiap pergantian pucuk pimpinan tertinggi Filipina, juga berganti cara dan ide penyelesaian bangsa Moro.
4. Di dalam Bangsa moro sendiri terjadi perpecahan, sehingga melahirkan ide dan cara melakukan perjuangan sendiri-sendiri mengakibatkan tidak menyatunya sebuah cita-cita.

Endnotes

¹ Moro adalah istilah yang umumnya digunakan oleh para penulis eropa terhadap umat Islam d Afrika Utara dan Andalusia Spanyol. Mulanya istilah tesebut digunakan orang-orang roma wi kepada penduduk Mauritania d Afrika Barat dengan

sebutan Mauri (berasal dari bahasa Punisia berarti Barat). Kemudian orang-orang Spanyol meminjam istilah itu menjadi Moro untuk para pemeluk Islam yang telah ditaklukkan negerinya. Dari istilah ini kemudian orang Inggris menggunakan kata Moor sebagai sebutan untuk kaum muslimin Spanyol dan Afrika Utara. Istilah Moro selanjutnya digunakan orang Spanyol dan Afrika Utara. Istilah Moro selanjutnya digunakan orang Spanyol kepada umat Islam yang dijumppainya di Filipina sewaktu mereka menaklukkan negeri tersebut. Lihat juga Panji Masyarakat, Laporan Utama, *Melacak Sejarah Perjuangan Bangsa Moro*, Panji Masyarakat No. 535 tahun 1987.

² M.B. Haoker, *Islamic Law in South-East Asia, East Asia Social Since Monographs*. (Singapura: Ford University, 1984), h. 221

³ George M.C. Tuman Hakim, *Governments and Politics of Southeast Asia* (USA: Cornell University Press, 1969), h. 949, Lihat pula M.B. Hooker, *Ibid*,

⁴ Lihat S. Suyanto, at. al. *Gerakan Militer Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*, (Jakarta: The Niddep Institut, 2003) h. 176

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*, h. 215

⁷ *Ibid*, h. 82

⁸ Ensiklopedi Islam, h. 82

⁹ Ensiklopedi, h. 315

¹⁰ Ensiklopedi Islam, *Op.cit.*, h. 66

¹¹ Ensiklopedi, *Op.cit*, h. 172

¹² S. Yonanto, *Op.cit*, h. 172

¹³ Ensiklopedi, *Op.cit*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Lihat S. Yunanto at. Al, *Op.cit*, h. 216

¹⁶ *Ibid*, h. 217

¹⁷ *Ibid*, h. 218

¹⁸ *Ibid*, h. 218-219

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib Thahir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Melacak akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- George M.C. Tuman Hakim, *Govemrns and Politic or Southeast Asia USA*: Cornel University Press, 1969
- M.B. Haoker, *Islamic Law in South-East Asia, East Asia Cocial Since Monographs*. Singapura: Ford University. 1984
- Panji Masyarakat, Laporan Utama , *Melacak Sejarah Perjuangan Bangsa Moro*, Panji Masyarakat No. 535 1987
- S. Suyanto, , at. al. *Gerakan Militer Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*, Jakarta: The Nidep Institut 2003
- Sudirman Tebba, (ed) *Perkembangan Muthahir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan 1993
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1992.

